



SULUK AKSARA

Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia

Volume 1, Nomor 2, Oktober 2025, Hal 134—149

**SIMBOLISME RELIGIUS DAN REPRESI ESTETIK: STUDI KRITIS ATAS DUALISME
SASTRA DI PESANTREN**

Mohammad Fikri

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, Jember

Email: rindumaulid@gmail.com

Keywords:

*Islamic boarding school
literature, symbolic power,
ideology of obedience*

Abstract

This study aims to critically examine the dualism of literature in Islamic boarding schools by highlighting the relationship between religious symbolism and aesthetic repression in literary practice. The focus of the research is directed at how Islamic boarding school authorities legitimize religious literature such as nadhoman, Barzanji, Burdah, and Seket Aqid, while simultaneously limiting modern literature such as contemporary novels and poetry. This study uses a qualitative approach with a case study design in an Islamic boarding school in Jember. Data were collected through participant observation, in-depth interviews with caretakers, ustadz, and senior students, as well as a review of institutional documents, then analyzed using thematic analysis techniques with the symbolic power framework of Pierre Bourdieu, the ideological apparatus of Louis Althusser, and Michel Foucault's body discipline. The results show that religious literature is institutionalized as an instrument for shaping obedience, piety, and legitimizing dominant values through the ritualization and sacralization of texts. Conversely, modern literature is repressed because it is considered to have the potential to disrupt moral stability, gender relations, and the ideological control of Islamic boarding schools. The conclusion of this study confirms that literature in Islamic boarding schools does not operate as a neutral aesthetic space, but rather as an arena of symbolic power that regulates the production of meaning, imagination, and subjectivity of students. This literary dualism reflects a hegemonic mechanism in maintaining the ideology of obedience through the medium of religious literacy.

PENDAHULUAN

Dalam lingkungan pendidikan Islam tradisional seperti pesantren, sastra tidak hanya dimaknai sebagai produk estetik, tetapi juga sebagai medium penyemaian nilai-nilai moral dan spiritual yang dilegitimasi secara institusional. Teks-teks religius seperti *nadhoman*, *Barzanji*, *Burdah*, dan *Seket Aqoid* telah menjadi bagian integral dari kurikulum maupun praktik ritual, menempati posisi istimewa dalam struktur epistemik pesantren. Fungsi sastra dalam konteks ini melampaui hiburan atau ekspresi individual; ia menjelma menjadi bagian dari formasi ideologis yang mengikat relasi antara bahasa, iman, dan ketaatan (Latief, 2021). Kuatnya posisi teks religius dalam pesantren menunjukkan adanya afiliasi yang erat antara sastra dan kekuasaan, di mana institusi tidak hanya mengafirmasi, tetapi juga mengontrol jenis dan isi wacana yang beredar di ruang pendidikan. Sastra menjadi instrumen formasi subjektivitas religius sekaligus perangkat reproduksi nilai-nilai dominan.

Namun, tidak semua bentuk sastra mendapat legitimasi yang sama. Di berbagai pesantren, termasuk pesantren lokasi penelitian ini, terdapat pembatasan eksplisit maupun implisit terhadap sastra modern seperti novel dan puisi kontemporer. Karya-karya tersebut diposisikan sebagai representasi kebebasan ekspresi yang berpotensi mengganggu struktur moral, gender, dan otoritas spiritual pesantren. Pelarangan membaca novel dengan tema relasi antargender, misalnya, seringkali dikaitkan dengan kekhawatiran terhadap munculnya hasrat yang dianggap tidak terkendali dan distraktif terhadap kesalehan santri (Abidin & Fauziah, 2020). Di sinilah terjadi dikotomi yang tajam antara sastra yang dianggap “halal” karena tunduk pada nilai-nilai religius, dan sastra yang “haram” karena diasosiasikan dengan emosi, subjektivitas, atau kebebasan berpikir. Dikotomi ini merupakan manifestasi dari kuasa simbolik yang menandai dan menyeleksi ekspresi kultural sesuai dengan kepentingan dominan (Bourdieu, 1984).

Sayangnya, kajian akademik yang secara khusus mengkritisi relasi antara sastra, institusi, dan kuasa simbolik dalam pesantren masih terbatas. Sebagian besar literatur hanya memfokuskan pada literasi keagamaan atau peran sastra religius sebagai sarana internalisasi nilai (Rohman & Aziz, 2022), tanpa mengulik bagaimana institusi pendidikan keagamaan juga berperan sebagai aparatus ideologis yang meregulasi makna dan batas estetik secara sistematis (Althusser, 1971). Sementara itu, peran disiplin tubuh dan pengawasan moral dalam membentuk pola ekspresi di kalangan santri, yang berkelindan dengan larangan atas jenis sastra tertentu, luput dari perhatian. Kesenjangan ini menandai pentingnya pendekatan yang tidak hanya mendeskriptifkan praktik sastra di pesantren, tetapi juga mengungkap logika kuasa dan ideologi yang bekerja di baliknya.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis dualisme sastra di lingkungan pesantren, dengan menyoroti bagaimana otoritas keagamaan membentuk wacana sastra yang sah dan tidak sah berdasarkan nilai-nilai institusional. Studi ini berfokus di sebuah pesantren di Jember sebagai studi kasus, dengan menelusuri praktik pembacaan, pelarangan, dan penilaian terhadap teks sastra yang berlangsung secara formal maupun informal. Sastra religius seperti *nadhoman* diposisikan sebagai instrumen kepatuhan kolektif, sedangkan sastra modern dicurigai sebagai potensi disrupsi terhadap stabilitas moral. Dengan menggunakan teori institusionalisasi sastra, kuasa simbolik (Bourdieu), serta konsep aparatus ideologis

(Althusser), artikel ini menjelaskan bagaimana hierarki sastra dibentuk melalui legitimasi moral dan kekuasaan institusional yang saling terkait.

Kontribusi utama dari artikel ini terletak pada penyajian perspektif interdisipliner antara studi sastra, pendidikan Islam, dan teori kuasa kultural. Tidak hanya menawarkan pemahaman baru atas relasi antara teks dan institusi, tulisan ini juga mengusulkan pendekatan kritis terhadap dinamika kontrol simbolik dalam komunitas keagamaan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan ideologi kepatuhan melalui sastra bukan hanya peristiwa kultural, tetapi juga bagian dari strategi hegemonik yang lebih luas untuk menjaga dominasi nilai tertentu atas ekspresi simbolik (Williams, 1977). Dengan demikian, artikel ini menghadirkan novelty dalam wacana literasi pesantren: bahwa estetika bukanlah wilayah netral, melainkan ruang yang terus dinegosiasikan antara kuasa dan kebebasan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang bersifat eksploratif dan interpretatif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan untuk memahami secara mendalam dinamika internal di sebuah pesantren di Jember dalam memproduksi, mengatur, dan melegitimasi praktik kesastraan. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji secara intensif kompleksitas relasi antara teks, otoritas keagamaan, dan nilai-nilai institusional dalam konteks budaya yang khas (Creswell C. N., 2018). Penelitian ini tidak bertujuan untuk generalisasi luas, melainkan untuk menjelaskan praktik dan makna sastra dalam suatu komunitas religius dengan mempertimbangkan struktur kekuasaan yang menyertainya.

Lokasi penelitian dipusatkan di sebuah pesantren di Jember, Jawa Timur, yang menjadi lokasi penting karena mempertahankan tradisi sastra religius seperti *nadhoman Alfiah*, *Barzanji*, *Burdah*, dan *Seket Aqoid*, sekaligus menolak bentuk-bentuk sastra modern seperti novel dan puisi bebas. Demi menjaga kerahasiaan institusi dan menghindari stigmatisasi terhadap praktik internal yang bersifat sensitif, penulis memilih untuk tidak menyebutkan nama lembaga secara eksplisit. Keputusan ini diambil atas pertimbangan etis dan berdasarkan prinsip *informed confidentiality* yang disepakati bersama pihak pesantren. Meskipun tidak disebutkan secara terbuka, karakteristik institusi, sistem pendidikan, dan nilai-nilai normatif yang dianalisis tetap dapat diidentifikasi sebagai representasi umum dari pesantren salafi berbasis literasi religius tradisional. Strategi ini mendukung validitas analitik dengan tetap menjaga integritas naratif dan sensitivitas sosial (Creswell & Poth, 2018). Pemilihan subjek dilakukan secara purposif terhadap tiga kelompok utama: pengasuh pesantren, ustadz pengampu pelajaran sastra keagamaan, dan santri senior. Metode pengumpulan data melibatkan observasi partisipatif terhadap kegiatan pengajian dan pembacaan teks-teks sastra religius, wawancara mendalam dengan pengasuh dan santri, serta telaah dokumen internal pondok seperti tata tertib, buletin pesantren, dan catatan pembelajaran. Triangulasi metode digunakan untuk menjaga validitas data melalui verifikasi silang antara observasi, wawancara, dan dokumen (Flick, 2019).

Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik dan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña yang melibatkan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara simultan

dan berulang (Miles et al., 2020). Analisis ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola dominasi dan eksklusivitas dalam wacana keagamaan, serta relasi kuasa yang membentuk batas-batas antara sastra religius dan modern. Kategori analisis utama meliputi praktik pembacaan, pelarangan, pembungkaman makna, dan regulasi terhadap ekspresi sastra di lingkungan pesantren (Fikri, 2025). Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan interpretatif untuk memahami makna simbolik dari teks-teks yang digunakan dalam ritual keagamaan dan pendidikan.

Posisi peneliti (positionality) sebagai outsider yang memiliki latar belakang akademik di bidang studi Islam dan sastra menjadikan proses interpretasi bersifat reflektif dan penuh kesadaran terhadap bias kultural. Strategi member check dilakukan dengan mengonfirmasi hasil sementara kepada informan utama guna memastikan akurasi makna dan pengalaman yang ditafsirkan. Penelitian ini berupaya menjaga etika keterlibatan dengan menekankan prinsip penghormatan terhadap nilai-nilai lokal dan sensitivitas budaya terhadap struktur otoritas pesantren (Merriam Elizabeth J., 2016). Hal ini penting untuk menghindari reproduksi stigma terhadap lembaga keagamaan sekaligus menjaga objektivitas akademik.

Metode ini mendukung pembacaan sastra sebagai ruang simbolik yang dipenuhi oleh relasi kuasa. Teori institusionalisasi sastra digunakan untuk menelusuri bagaimana pesantren sebagai lembaga mereproduksi batasan-batasan sastra yang sah secara kultural. Konsep kuasa simbolik dan habitus dari Pierre Bourdieu digunakan untuk membaca mekanisme pembentukan preferensi estetis, termasuk klasifikasi karya sebagai “halal” atau “haram” secara kultural. Sementara itu, teori aparat ideologis Louis Althusser berfungsi menjelaskan bagaimana pesantren sebagai institusi menanamkan ideologi kesalehan melalui sastra yang dikontrol dan dilembagakan. Dalam kerangka ini, teks sastra bukan hanya karya estetika, tetapi juga alat ideologis yang mengatur kesadaran kolektif (Althusser, 1971; Bourdieu, 1991).

Dengan demikian, metodologi yang digunakan tidak hanya menjelaskan fenomena sastra di pesantren secara empiris, tetapi juga memungkinkan pembacaan kritis terhadap hubungan antara lembaga, nilai, dan produksi kultural. Sastra religius yang diposisikan sebagai instrumen ritual dan moral menjadi titik masuk untuk memahami mekanisme hegemonik dalam pembentukan ideologi kepatuhan di ruang pendidikan Islam tradisional. Sementara itu, penolakan terhadap novel dan puisi modern dipahami sebagai upaya kontrol simbolik atas tubuh, emosi, dan imajinasi yang dianggap berpotensi menggoyahkan struktur nilai dominan. Penelitian ini, dengan demikian, berupaya membuka ruang refleksi atas batas-batas estetika dan ideologi yang mengatur kehidupan literer di pesantren kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Simbolisme Religius dalam Sastra yang Diizinkan di Pesantren

Sastra religius seperti *nadhoman Alfiah*, *Barzanji*, *Burdah*, dan *Seket Aqoid* memiliki posisi simbolik yang tinggi dalam lingkungan pesantren, termasuk di Pondok lokasi penelitian ini. Karya-karya tersebut tidak diperlakukan semata sebagai produk estetika, melainkan dimaknai sebagai media ritual yang menghubungkan santri dengan dimensi spiritual. Praktik pembacaan secara berjamaah, penghafalan

terstruktur, serta pengulangan harian menunjukkan bahwa teks-teks ini telah mengalami institusionalisasi sebagai bagian dari ibadah. Dalam kerangka teori simbolisme religius, sastra tersebut mengalami "sakralisasi simbolik" yang membuatnya tidak lagi terbuka untuk kritik atau reinterpretasi bebas (Trimingham, 2020). Di titik ini, fungsi ritual mengungguli fungsi ekspresif sastra.

Dalam wawancara dengan pengajar senior, disebutkan bahwa nadhoman seperti *Alfiah Ibnu Malik* tidak hanya membantu santri menghafal kaidah nahwu, tetapi juga mendidik mereka untuk patuh pada otoritas ilmu dan tradisi. Hal ini memperlihatkan bagaimana sastra digunakan sebagai instrumen pedagogis sekaligus alat legitimasi kekuasaan simbolik. Merujuk pada Bourdieu, karya-karya tersebut telah menjadi bagian dari habitus pesantren produk budaya yang ditanamkan sejak dini dan direproduksi melalui mekanisme pendidikan (Bourdieu, 1991). Dengan demikian, pilihan atas karya-karya ini bukanlah netral, melainkan produk dari struktur sosial-keagamaan yang mendefinisikan sastra "sah".

Penggunaan *Barzanji* dan *Burdah* dalam perayaan keagamaan (maulid, haul) memperkuat fungsi simbolik sastra religius sebagai alat pemersatu komunitas dan penguat identitas religius. Kegiatan pembacaan dilakukan secara performatif, melibatkan aspek suara, irama, bahkan ekspresi tubuh santri. Praktik ini memperlihatkan bahwa sastra tidak diposisikan sebagai media individual, melainkan sebagai pengalaman kolektif yang dimediasi secara ideologis. Menurut Sulaiman dan Zulkifli (Sulaiman & Zulkifli, 2021) sastra dalam konteks Islam tradisional tidak dapat dipisahkan dari fungsi sosialnya yang memperkuat jaringan keimanan dan kepatuhan komunitarian. Oleh karena itu, karya semacam *Barzanji* menjadi simbol kesalehan yang nyaris tak tergantikan.

Sekèt Aqoid, sebagai karya lokal Madura karangan KHR As'ad Samsul Arifin, memiliki posisi unik sebagai representasi sastra yang menggabungkan tradisi lokal dengan ajaran akidah. Di Pesantren ini, teks ini dibaca dengan penghayatan tinggi dan dianggap sebagai pengantar pemahaman tauhid yang "merakyat". Hal ini menunjukkan bahwa pesantren tidak semata menyeleksi karya berdasarkan nilai teologis, tetapi juga berdasarkan legitimasi kultural. Seperti dijelaskan oleh Ma'arif (Ma'arif, 2022), karya lokal yang mendapat pengesahan kiai pesantren berpotensi menjadi bagian dari kanon sastra religius jika memenuhi syarat kesalehan representasional. Dengan demikian, *Sekèt Aqoid* menjadi contoh bagaimana institusi religius menetapkan otoritas sastra melalui mekanisme simbolik.

Simbolisme religius yang melekat pada karya-karya tersebut menciptakan semacam "benteng suci" terhadap teks, yang menjadikannya kebal dari tafsir alternatif atau kritik struktural. Santri cenderung menerima isi karya sebagaimana adanya, tanpa ruang diskusi mengenai estetika, wacana kuasa, atau muatan ideologis. Dalam perspektif teori sastra institusional, ini menunjukkan bahwa pesantren memainkan peran sebagai lembaga yang tidak hanya mengajarkan, tetapi juga *mengatur* cara membaca sastra (Widdowson, 2019). Hierarki nilai-nilai dalam sastra dibentuk secara top-down, dengan legitimasi dari otoritas spiritual.

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana pesantren membentuk otoritas simbolik melalui sastra religius yang dikondisikan sebagai "suci", sementara bentuk sastra lain tidak mendapat tempat yang sama. Otoritas tersebut tidak hanya bersumber dari keilmuan keagamaan, tetapi juga dari simbolisme kolektif

yang telah dibentuk selama bertahun-tahun melalui repetisi ritual dan representasi simbolik. Seperti dijelaskan oleh Huda dan Kamal(Huda & Kamal, 2023), sastra dalam institusi keagamaan sering kali menjadi instrumen untuk melanggengkan struktur nilai dan kekuasaan kultural. Dalam konteks pesantren ini, sastra religius berperan sebagai “perpanjangan lidah” dari otoritas spiritual.

Penguatan nilai kesalehan melalui sastra juga berdampak pada pembentukan identitas santri sebagai subjek yang patuh dan tidak kritis terhadap teks. Dalam observasi penulis selama mengikuti kegiatan pembacaan *Barzanji*, terlihat bahwa santri mengikuti dengan posisi duduk formal, tidak berbicara, dan tidak mempertanyakan isi teks. Disiplin ini tidak bersifat teknis, melainkan simbolik, sebagaimana ditafsirkan dalam teori kuasa tubuh Foucault yang menyatakan bahwa praktik berulang dapat membentuk pola kepatuhan internal(Foucault, 1977). Dalam hal ini, sastra menjadi alat pembentukan etika tubuh dan mentalitas yang sesuai dengan struktur ideologis pesantren.

Lebih jauh, legitimasi terhadap karya-karya religius juga berdampak pada bagaimana santri menilai sastra secara umum. Dalam wawancara dengan beberapa santri senior, mereka menyatakan bahwa sastra “yang baik” adalah yang mengandung pujian terhadap Nabi, ajaran tauhid, atau nilai moral Islam. Ini menunjukkan bahwa kerangka penilaian estetika telah dibatasi oleh batas ideologis yang diperkuat oleh institusi. Sebagaimana dijelaskan oleh Rahmah dan Yusuf(Rahmah & Yusuf, 2020), dalam ruang pendidikan keagamaan, konsep sastra tidak dapat dipisahkan dari wacana dakwah, sehingga menutup ruang bagi pendekatan literer yang independen.

Dengan demikian, simbolisme religius yang melekat pada sastra di pesantren membentuk sistem estetika yang dikendalikan oleh otoritas keagamaan. Sastra religius menjadi *legitimated discourse* yang memiliki kekuatan membentuk persepsi, perilaku, dan norma komunitas. Merujuk pada Bourdieu(Bourdieu, 1990), hal ini mencerminkan operasi kuasa simbolik di mana bentuk budaya tertentu dilegitimasi sebagai superior melalui proses pendidikan dan reproduksi simbolik. Di lingkungan pesantren seperti di lokasi penelitian ini, legitimasi ini berperan dalam mengarahkan imajinasi sastra ke dalam jalur kepatuhan, bukan kebebasan.

Sastra yang Direpresi, Novel dan Puisi Kontemporer

Pelarangan atas novel dan puisi kontemporer di Pondok Pesantren ini bukan sekadar kebijakan internal, tetapi cermin dari sistem ideologis yang mengatur wacana kesusastraan dalam batas nilai-nilai moral pesantren. Tidak seperti *nadhoman* atau *Barzanji* yang dilegitimasi sebagai bagian dari ibadah, sastra modern dianggap membawa muatan simbolik yang rawan menggoyahkan tatanan. Hal ini selaras dengan gagasan Bourdieu mengenai kuasa simbolik, di mana institusi seperti pesantren berperan sebagai agen pelestari budaya dominan dan sekaligus pengontrol bentuk-bentuk ekspresi yang dianggap subversif(Bourdieu, 1991). Dalam konteks ini, novel dan puisi tidak hanya diposisikan sebagai teks, tetapi sebagai ruang imajinatif yang mengancam struktur kepatuhan.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pembacaan puisi yang melibatkan santri putra dan putri ditolak secara tegas oleh pengurus pesantren, dengan alasan “menjaga kesucian suasana” dan

“menghindari potensi fitnah”. Penolakan ini menandakan bahwa ekspresi sastra modern tidak diterima bukan karena bentuk estetikanya, melainkan karena asosiasinya dengan kebebasan, emosi, dan kemungkinan interaksi antarjenis kelamin. Menurut Hasanah (Hasanah, 2022a), dalam lembaga pendidikan keagamaan konservatif, tubuh dan ekspresi santri tidak hanya diawasi, tetapi dikendalikan melalui regulasi simbolik yang mengakar pada nilai komunitarian. Sastra menjadi salah satu medan pertempuran antara kebebasan ekspresi dan logika moral kolektif.

Wawancara dengan salah satu pengasuh mengungkap kekhawatiran bahwa novel sering kali memuat “cerita cinta”, “pemikiran liar”, atau “tokoh yang tidak Islami”. Pernyataan ini menunjukkan bagaimana otoritas pesantren membangun dikotomi antara “sastra suci” dan “sastra berbahaya” berdasarkan persepsi akan potensi subversif terhadap norma. Dalam kerangka teori kritik sastra institusional, hal ini dapat dipahami sebagai upaya lembaga untuk membatasi ruang interpretasi dan mengatur sistem penerimaan karya sastra (Faruk, 2019). Sastra yang tidak mendukung nilai dominan dianggap tidak layak masuk ke ruang belajar dan budaya pesantren.

Novel dan puisi kontemporer cenderung menampilkan keragaman perspektif, konflik batin, dan kritik sosial, yang semuanya dapat membuka ruang bagi santri untuk mempertanyakan struktur yang ada. Hal ini dipandang berbahaya karena bertentangan dengan nilai kepatuhan dan ketundukan yang menjadi fondasi pedagogi pesantren. Studi oleh Lubis dan Ardi (M. Lubis & Ardi, 2021) menunjukkan bahwa sastra modern sering kali dilarang di institusi keagamaan karena membuka ruang kritik dan refleksi atas nilai yang selama ini diterima secara dogmatis. Dengan kata lain, novel bukan hanya dilarang karena isinya, tetapi karena ia membuka kemungkinan bagi subjek pembaca untuk bersikap kritis.

Selain karena substansi teks, pelarangan juga diperkuat oleh kekhawatiran terhadap media dan cara distribusi sastra modern. Banyak novel beredar melalui platform digital atau diterbitkan oleh penerbit umum yang tidak tunduk pada kontrol keagamaan. Kekhawatiran ini menunjukkan adanya ketegangan antara otoritas lokal dan arus budaya global. Seperti dikemukakan oleh Alimuddin (M. Alimuddin, 2023), dalam masyarakat keagamaan tertutup, teknologi dan literasi modern sering kali dianggap sebagai pintu masuk liberalisasi nilai yang bertentangan dengan norma tradisional. Maka, pelarangan sastra modern juga merupakan bentuk resistensi terhadap penetrasi nilai luar.

Aspek gender turut menjadi instrumen dalam pembenaran represi. Novel dan puisi dianggap mendorong percampuran antara laki-laki dan perempuan baik secara simbolik (melalui narasi) maupun fisik (melalui ruang baca bersama atau kegiatan seni). Dalam observasi kegiatan ekstrakurikuler, terlihat bahwa wacana seputar “fitnah” dan “jaga batas” digunakan untuk menghentikan pembacaan puisi publik meskipun dilakukan dengan sopan. Studi dari Rofiah dan Kurniawati (H. Rofiah & Kurniawati, 2020) menunjukkan bahwa di banyak pesantren, ideologi kesalehan perempuan dijaga melalui pembatasan ekspresi budaya. Sastra, sebagai ruang simbolik yang penuh nuansa emosi dan estetika, dinilai rawan menggoyahkan kontrol atas tubuh dan relasi gender.

Represi atas sastra modern juga terjadi melalui penyeleksian bacaan di perpustakaan pesantren. Novel-novel karya penulis perempuan atau yang mengangkat tema kesetaraan jarang ditemukan atau

secara aktif dihapus dari rak. Hal ini memperkuat bahwa seleksi bahan bacaan dilakukan bukan berdasarkan kualitas literer, tetapi berdasarkan kecocokan ideologis. Seperti dinyatakan oleh Nurhasanah(Nurhasanah, 2021), sensor sastra dalam pendidikan Islam tradisional lebih bersifat preventif simbolik daripada analisis tekstual, artinya yang diatur adalah potensi pengaruh, bukan isi teks secara objektif. Maka, institusi pesantren berperan sebagai “kurator ideologis” dalam dunia sastra.

Sikap terhadap sastra modern di Pesntren ini memperlihatkan adanya produksi wacana moral yang aktif. Tidak hanya melarang, tetapi juga membentuk cara pandang bahwa membaca novel atau menulis puisi adalah aktivitas yang sia-sia, tidak bermanfaat, atau bahkan merusak iman. Dalam wawancara, seorang santri menyebut bahwa membaca novel dianggap “kurang berkah” dibandingkan menghafal *nadhoman*. Ini menunjukkan bahwa sastra modern mengalami delegitimasi tidak hanya melalui larangan struktural, tetapi juga melalui pembentukan persepsi negatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Yulianto dan Prasetya(Yulianto & Prasetya, 2020), dalam sistem pendidikan berbasis nilai, kontrol atas sastra dilakukan melalui normalisasi narasi apa yang dianggap layak dan tidak layak dibaca.

Represi ini menegaskan posisi pesantren sebagai lembaga yang tidak netral dalam menentukan nilai-nilai estetik. Sastra modern yang berbasis pada kebebasan interpretasi, eksplorasi psikologis, dan keragaman pengalaman dianggap mengganggu tatanan simbolik yang telah mapan. Dalam pandangan Bourdieu, tindakan tersebut merupakan bentuk *distinction*, proses di mana otoritas budaya menetapkan mana yang pantas dan tidak pantas dibaca berdasarkan habitus kolektif yang sudah dikondisikan(Bourdieu, 1991). Dengan demikian, larangan atas novel dan puisi di pesantren bukanlah bentuk kekhawatiran moral belaka, melainkan mekanisme kuasa simbolik yang menjaga hegemoninya.

Dualisme sastra di pesantren

Dalam struktur pendidikan pesantren, dualisme sastra tampak mengakar kuat melalui pembagian tajam antara “sastra religius” yang dilegitimasi dan “sastra modern” yang dicurigai. Karya-karya seperti *nadhoman Alfyyah*, *Barzanji*, *Burdah*, dan *Seket Aqoid* tidak hanya diajarkan, tetapi juga diritualkan secara kolektif sebagai bagian dari ibadah dan transmisi tradisi. Sementara itu, novel dan puisi kontemporer dianggap sebagai bentuk ekspresi yang membawa pengaruh luar dan berpotensi merusak moral santri. Pembagian ini bukan sekadar preferensi estetika, melainkan manifestasi dari kuasa simbolik yang dilembagakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Faruk(Faruk, 2019), institusi pendidikan tradisional seringkali bertindak sebagai agen penyaring estetika untuk memastikan kesinambungan ideologis.

Pesantren sebagai institusi memiliki peran kunci dalam mengonstruksi hierarki estetika sastra melalui proses institusionalisasi, yakni menentukan mana sastra yang “sah” dalam pandangan agama dan mana yang tidak. Naskah-naskah religius dilembagakan sebagai teks suci yang bukan hanya bernilai literer tetapi juga spiritual, sementara karya fiksi modern dianggap banal dan tidak mendukung kesalehan. Proses ini menunjukkan bagaimana lembaga memproduksi wacana dan nilai yang membentuk resepsi estetik komunitas. Sejalan dengan itu, teori institusionalisasi sastra menjelaskan bahwa nilai estetika ditentukan bukan oleh teks itu sendiri, melainkan oleh otoritas yang mengontrol akses dan penerimaan

terhadap teks(Nugroho, 2020). Hierarki ini bersifat hegemonik karena disosialisasikan melalui repetisi praktik dan simbol.

Di pesantren ini, sastra religius memperoleh tempat istimewa karena dianggap selaras dengan visi kesalehan kolektif. Santri diajak menghafal *nadhoman Alfiah* bukan hanya sebagai latihan gramatikal, tetapi juga sebagai ritual kultural yang menunjukkan ketundukan pada tradisi. Bahkan dalam perayaan Maulid Nabi, pembacaan *Barzanji* menjadi pusat seremoni spiritual yang mempertemukan nilai estetika dan kesucian. Praktik semacam ini membentuk “habitus sastra religius” yang ditanamkan melalui pengulangan dan internalisasi. Menurut Bourdieu, habitus merupakan kerangka disposisi sosial yang menentukan selera, termasuk selera estetik, dan terbentuk dalam ranah kuasa yang menentukan apa yang layak dibaca dan dirayakan.

Sebaliknya, ekspresi sastra modern seperti novel atau puisi kontemporer diposisikan sebagai potensi gangguan terhadap tatanan moral dan sosial. Salah satu ustadz menyatakan bahwa novel seringkali “mengandung kisah cinta yang tidak mendidik,” dan pembacaan puisi “tidak sesuai dengan adab pergaulan santri,” khususnya bila melibatkan pertemuan santri putra dan putri. Pernyataan ini menunjukkan bagaimana kekhawatiran terhadap isi dan konteks peredaran sastra modern beroperasi sebagai justifikasi pelarangan. Menurut Alimuddin(R. Alimuddin, 2023), sensor dalam pendidikan pesantren lebih banyak diarahkan pada bentuk dan medium narasi yang dianggap dapat menstimulasi hasrat atau membentuk imajinasi yang bebas dari nilai tradisional. Di sinilah sastra modern menjadi simbol keterancaman terhadap struktur otoritas.

Pengawasan terhadap sastra modern juga berkaitan erat dengan kontrol terhadap tubuh dan gender dalam pesantren. Larangan pembacaan puisi di depan publik, terutama yang melibatkan santri lintas gender, menunjukkan bagaimana ekspresi estetik dikaitkan langsung dengan disiplin moral. Kegiatan membaca puisi yang dalam konteks modern merupakan praktik apresiasi seni, diinterpretasi ulang sebagai potensi fitnah dan pelanggaran adab. Sebagaimana dijelaskan oleh Hasanah(Hasanah, 2022b), dalam pendidikan Islam tradisional, tubuh perempuan (dan relasi antar gender) menjadi titik pusat pengawasan simbolik yang meluas hingga ranah ekspresi budaya. Dalam kerangka ini, pelarangan puisi bukan hanya karena isi, tetapi karena strukturnya yang terbuka, tidak terikat, dan sulit dikontrol.

Dikotomi ini memperlihatkan bagaimana pesantren secara aktif menjalankan mekanisme hegemonik budaya sebagaimana dijelaskan Raymond Williams, yakni melalui naturalisasi nilai tertentu sebagai *common sense* komunitas. Sastra religius menjadi norma karena dilegitimasi oleh sejarah dan ritual, sementara sastra modern menjadi deviasi karena tidak memiliki akar dalam kebudayaan internal. Dalam hal ini, hegemonik tidak bersifat koersif, melainkan konsensual nilai sastra religius diterima karena sudah diinstitusionalisasikan melalui pendidikan, upacara, dan otoritas simbolik. Rofiah dan Kurniawati(C. Rofiah & Kurniawati, 2020) mencatat bahwa wacana kesalehan di pesantren menciptakan standar kultural yang menentukan apa yang boleh diakses dan bagaimana ia ditafsirkan, termasuk dalam ranah literasi.

Pembatasan terhadap genre sastra tertentu menghasilkan kesenjangan akses terhadap narasi-narasi alternatif yang bisa memperluas cakrawala berpikir santri. Literatur modern yang membawa tema keadilan sosial, kemanusiaan, atau eksistensialisme justru dapat menjadi stimulus intelektual yang penting dalam pendidikan kritis. Namun, narasi semacam itu tidak memiliki tempat dalam lingkungan pesantren yang cenderung memprioritaskan stabilitas ideologis. Seperti ditunjukkan oleh Lubis dan Ardi (M. A. Lubis & Ardi, 2021), sastra kontemporer sering ditolak karena menawarkan model interpretasi dunia yang dinamis dan tidak satu arah, bertentangan dengan sistem nilai yang mapan. Hierarki sastra ini, dalam istilah Bourdieu, menciptakan eksklusi simbolik terhadap selera-selera yang tidak sesuai dengan modal kultural dominan.

Hierarki estetik yang dilembagakan pesantren juga membentuk budaya kepatuhan estetik, yakni pola pembacaan dan penghargaan terhadap karya yang dibatasi oleh otoritas. Dalam observasi di kelas sastra, santri lebih diberi ruang untuk melagukan *nadhoman* daripada menganalisis makna puisi modern. Ketika ada santri yang membawa buku puisi Chairil Anwar, guru meminta untuk “jangan dibaca saat jam pesantren.” Fenomena ini menunjukkan bahwa batas antara sastra dan non-sastra tidak bersifat objektif, melainkan ditentukan oleh mekanisme kuasa. Menurut Nurhasanah, dalam pendidikan Islam tradisional, pembentukan literasi tidak diarahkan pada keberagaman teks, melainkan pada penguatan teks yang telah dibakukan secara simbolik.

Secara keseluruhan, dualisme sastra di pesantren bukan sekadar hasil selera institusional, tetapi merupakan produk dari kekuasaan simbolik yang membatasi wacana dan imajinasi. Sastra religius dilembagakan sebagai instrumen ketundukan, sedangkan sastra modern dicurigai sebagai sarana penyimpangan. Kuasa ini bekerja melalui pembiasaan (*habitus*), pembatasan akses (modal kultural), dan legitimasi nilai (*hegemonik*). Ketika sastra dipaksa tunduk pada struktur moral dan tradisional, maka imajinasi pun ikut dikendalikan dalam bingkai ideologis. Dengan demikian, sastra menjadi arena kontestasi simbolik antara otoritas dan potensi kebebasan.

Ideologi Kepatuhan dalam Ruang Sastra

Di Pondok Pesantren tempat penelitian ini dilakukan, struktur otoritas keagamaan membingkai sastra sebagai media pendidikan moral yang wajib tunduk pada nilai-nilai institusional. Sastra religius seperti *Barzanji*, *Burdah*, dan *Seket Aqoid* diposisikan sebagai bagian dari ibadah, sementara genre sastra modern seperti novel dan puisi kontemporer ditolak karena dinilai membuka ruang emosi, relasi gender, dan subjektivitas. Dalam wawancara dengan seorang ustadz senior, ia menyebut novel sebagai “bacaan yang banyak berisi cinta-cintaan, bisa membuat santri laki-laki dan perempuan tidak fokus mengaji.” Narasi ini menunjukkan bahwa sastra di pesantren tidak sekadar dinilai dari bentuk estetikanya, tetapi dari kepatuhannya terhadap kerangka moral institusi. Seperti yang ditunjukkan oleh Sari dan Lubis (Sari & Lubis, 2021), pembingkai nilai dalam lembaga keagamaan sering kali menciptakan klasifikasi wacana yang sah dan yang menyimpang.

Represi terhadap sastra modern di pesantren merupakan bentuk konkret dari apa yang disebut Althusser (Althusser, 1971) sebagai “aparatus ideologis”, yaitu lembaga-lembaga seperti pendidikan dan

agama yang berperan mereproduksi ideologi dominan. Dalam konteks ini, sastra tidak netral, melainkan alat untuk membentuk subjek yang taat. Larangan membuat puisi bebas atau menulis fiksi oleh santri menjadi bagian dari strategi pembatasan imajinasi dan ekspresi, yang bertujuan mencetak individu yang sesuai dengan norma komunitas. Pengurus pesantren pun melakukan penyaringan bahan bacaan masuk, memastikan hanya teks-teks yang sesuai nilai "kesalehan institusional" yang diizinkan. Penelitian oleh Hakim dan Mulyani (Hakim & Mulyani, 2020) memperkuat temuan ini, dengan menunjukkan bahwa literasi di lembaga keagamaan sering dikontrol secara ketat demi menjaga homogenitas ideologis.

Penekanan pada moralitas dan pengawasan atas tubuh santri dalam memilih dan mengakses sastra menunjukkan beroperasinya apa yang disebut Foucault (Foucault, 1977) sebagai "disiplin tubuh". Kontrol tidak hanya terhadap tindakan lahiriah, tetapi juga terhadap struktur keinginan dan persepsi santri terhadap dunia. Sastra menjadi arena yang diatur ketat karena ia mampu membentuk afeksi dan imajinasi. Ketakutan terhadap karya-karya yang menyentuh tema relasi laki-laki-perempuan atau eksistensialitas pribadi memperlihatkan bahwa kontrol atas sastra adalah kontrol atas tubuh dan afek. Studi oleh Yuliani dan Rizki (Yuliani & Rizki, 2023) menunjukkan bahwa institusi keagamaan memanfaatkan regulasi naratif untuk membatasi pembentukan identitas yang otonom di kalangan peserta didik.

Melalui mekanisme internalisasi nilai, pesantren memproduksi habitus sastra yang konservatif. Konsep Bourdieu (Bourdieu, 1991) tentang "kuasa simbolik" sangat relevan di sini pesantren menentukan nilai dari karya sastra bukan dari kualitas estetikanya, melainkan dari sejauh mana karya tersebut tunduk pada struktur nilai dominan. Habitus ini membentuk preferensi dan penolakan kolektif terhadap genre sastra tertentu. Dalam diskusi informal dengan beberapa santri senior, mereka menyatakan bahwa "puisi bebas itu tidak jelas arah dan manfaatnya, beda dengan nadham atau burdah yang mengandung pahala." Ungkapan ini mencerminkan bagaimana estetika dikonstruksi melalui ideologi religius. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wulandari (Wulandari, 2022) yang menegaskan bahwa pembiasaan literasi religius menciptakan rasa enggan terhadap bentuk narasi modern di kalangan pelajar pesantren.

Kepatuhan terhadap struktur nilai sastra di pesantren dibentuk bukan hanya melalui larangan, tetapi juga melalui penguatan simbolik. Pembacaan Burdah secara kolektif, misalnya, dilakukan setiap malam Jumat dan disertai penjelasan tafsir sufistik oleh pengajar. Praktik ini memberi legitimasi spiritual pada teks dan menempatkannya dalam posisi superior. Sementara itu, novel dan puisi modern tidak memiliki ruang institusional untuk dibaca atau didiskusikan secara terbuka. Seperti ditunjukkan oleh Rohim dan Azizah (Rohim & Azizah, 2021), penguatan simbolik dalam bentuk ritual sastra kolektif merupakan instrumen penting dalam mendefinisikan nilai kultural di institusi religius.

Selain sebagai instrumen kultural, pembungkaman sastra sebagai bagian dari proyek moral juga berfungsi sebagai benteng terhadap pengaruh luar. Novel modern sering diasosiasikan dengan budaya barat, kebebasan, dan liberalisme. Hal ini membentuk narasi oposisi antara "sastra pesantren" dan "sastra luar", yang menggambarkan modernitas sebagai ancaman ideologis. Dalam wawancara dengan seorang pengurus, ia menyebut novel sebagai "produk dari dunia luar yang tidak sesuai dengan pola

hidup santri”. Hal ini sejalan dengan temuan dalam studi literasi religius oleh Prasetya dan Nurhayati(Yulianto & Prasetya, 2020), bahwa institusi keagamaan sering menolak literatur modern sebagai upaya mempertahankan “kemurnian nilai”.

Gender juga menjadi instrumen kunci dalam pembentukan ideologi kepatuhan sastra. Penolakan terhadap acara pembacaan puisi campur putra-putri menunjukkan bahwa bentuk sastra tidak hanya dibatasi isinya, tetapi juga konteks sosialnya. Estetika puisi menjadi ancaman karena membuka ruang emosional dan kemungkinan pertemuan afektif antargender. Konsep “kesucian ruang” yang digunakan pengasuh pesantren memperkuat pengawasan moral dan mengontrol bentuk interaksi antar santri. Studi oleh Fadhilah dan Salim(Fadhilah & Salim, 2021) mengungkapkan bahwa dalam lembaga pendidikan berbasis agama, ruang ekspresi sering kali dibatasi atas dasar narasi moral yang terkait erat dengan kontrol gender.

Dengan demikian, sastra di lingkungan pesantren tidak dapat dilepaskan dari struktur kekuasaan simbolik yang menjadikannya instrumen ideologi. Proyek pembentukan subjek santri melalui literasi religius yang selektif mencerminkan kerja simultan dari aparat ideologis (Althusser), pengawasan tubuh (Foucault), dan habitus simbolik (Bourdieu). Pembatasan terhadap sastra modern bukan hanya bentuk penghindaran terhadap pengaruh budaya luar, tetapi juga bagian dari strategi institusional untuk mempertahankan stabilitas ideologis komunitas. Dalam konteks ini, sastra bukan hanya medan imajinasi, tetapi juga arena pertempuran makna antara kebebasan dan kepatuhan. Seperti disimpulkan oleh Hidayat dan Munir(Hidayat & Munir, 2022), ruang sastra yang dibatasi dalam lembaga keagamaan sering kali menunjukkan keterkaitan erat antara estetika dan hegemoni.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sastra di lingkungan pesantren, khususnya Pondok Pesantren tempat penelitian, tidak diposisikan sebagai ruang ekspresi bebas, melainkan sebagai medium yang tunduk pada struktur ideologis dan simbolik institusi keagamaan. Sastra religius seperti *nadhoman*, *Barzanji*, *Burdab*, dan *Seket Aqoid* dilegitimasi bukan hanya karena kandungan nilai spiritualnya, tetapi karena fungsinya dalam memperkuat kepatuhan, disiplin moral, dan kontinuitas tradisi. Karya-karya ini tidak hanya dibaca, tetapi juga diritualkan, sehingga membentuk habitus sastra yang tidak netral, melainkan dikondisikan oleh struktur kuasa yang dominan di pesantren. Dalam hal ini, sastra menjadi bagian dari apparatus ideologis lembaga yang menginternalisasi nilai kesalehan dan ketaatan melalui medium estetis.

Sebaliknya, sastra modern seperti novel dan puisi kontemporer cenderung direpresi dan dikesampingkan karena dianggap membawa potensi subversif terhadap nilai dominan, terutama terkait gender, relasi emosional, dan otonomi imajinasi. Larangan membaca novel, pembatasan puisi bebas, serta kekhawatiran terhadap literasi kreatif diidentifikasi sebagai bagian dari upaya mempertahankan struktur simbolik yang mengatur tubuh, emosi, dan subjektivitas santri. Kuasa simbolik pesantren membentuk klasifikasi antara sastra yang "sah" dan "tidak sah", yang berdampak pada hierarki literasi dan terbentuknya ideologi kepatuhan melalui medium bahasa dan narasi.

Temuan ini memperlihatkan bahwa dualisme sastra di pesantren bukan sekadar persoalan estetika atau selera literer, melainkan menyangkut relasi kuasa antara otoritas institusional, konstruksi nilai religius, dan kontrol terhadap produksi makna. Proses institusionalisasi sastra dilakukan melalui legitimasi simbolik terhadap bentuk tertentu, dan delegitimasi terhadap yang lain, membentuk ekologi sastra yang mapan dan sulit ditantang. Sastra religius bukan hanya dijaga sebagai warisan spiritual, tetapi juga sebagai alat pedagogi ideologis, sedangkan sastra modern diposisikan sebagai ancaman simbolik terhadap stabilitas nilai komunitas.

Dengan menggabungkan pendekatan kualitatif, teori institusionalisasi sastra, serta perspektif kuasa simbolik dan ideologi, artikel ini memberikan pemahaman baru bahwa produksi dan distribusi sastra di pesantren tidak bisa dilepaskan dari medan perjuangan simbolik yang menentukan siapa yang boleh bicara, karya mana yang boleh dibaca, dan imajinasi seperti apa yang boleh hidup. Dalam ruang ini, kesusastraan bukan hanya menjadi soal estetika, tetapi juga arena konflik antara tradisi dan kemungkinan emansipasi.

Kontribusi ilmiah dari artikel ini terletak pada upaya menjembatani kajian literasi, pendidikan Islam, dan teori kuasa budaya secara kritis dan interdisipliner. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya melihat sastra di pesantren bukan hanya sebagai alat dakwah atau ritual, tetapi juga sebagai medan ideologis yang merefleksikan dan sekaligus mengatur relasi kuasa dalam komunitas keagamaan. Hal ini penting untuk memperluas wacana tentang demokratisasi literasi dan kebebasan ekspresi di ruang-ruang pendidikan berbasis tradisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., & Fauziah, S. (2020). Santri dan Literasi Sastra Modern: Studi Kasus Pembatasan Bacaan di Pesantren Salafiyah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 17(1), 45–60. <https://doi.org/10.14421/jpai.2020.171-03>
- Alimuddin, M. (2023). Sensor Budaya dan Sastra dalam Pendidikan Pesantren. *Jurnal Pendidikan Dan Sastra*, 11(2), 134–149. <https://doi.org/10.24252/jps.v11i2.2023>
- Alimuddin, R. (2023). Literasi dan Sensor di Pesantren: Antara Tradisi dan Teknologi. *Jurnal Literasi Dan Peradaban*, 4(2), 89–105. <https://doi.org/10.53832/jlp.v4i2.4087>
- Althusser, L. (1971). *Lenin and Philosophy and Other Essays*. Monthly Review Press.
- Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Harvard University Press.
- Bourdieu, P. (1990). *The Logic of Practice*. Stanford University Press.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power* (J. B. Thompson (ed.)). Harvard University Press.
- Creswell C. N., J. W. and P. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publications.

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4 ed.). Sage Publications.
- Fadhilah, R., & Salim, K. (2021). Gender and Literary Control in Islamic Educational Institutions. *Indonesian Journal of Gender and Society*, 5(2), 147–163. <https://doi.org/10.23917/ijgs.v5i2.2021>
- Faruk. (2019). *Politik Sastra: Teori dan Praktik Institusionalisme dalam Sastra*. Ombak.
- Fikri. (2025). Sound Horeg as A Popular Cultural Discourse: A Cultural Criticism Study of Religious Responses in East Java. *Tutur Sintaksis | Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, Kajian Linguistik Dan Kearifan Lokal*, 1(1), 25–41. <https://doi.org/10.64344/trst.v1i1.31>
- Flick, U. (2019). *An Introduction to Qualitative Research*. Sage Publications.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Pantheon Books.
- Hakim, L., & Mulyani, R. (2020). Literacy and the Politics of Inclusion in Traditional Islamic Schools. *Indonesian Journal of Educational Review*, 7(1), 45–60. <https://doi.org/10.21009/ijer.v7i1.2020>
- Hasanah, N. (2022a). Gender dan Disiplin Tubuh dalam Pendidikan Pesantren. *Jurnal Gender Dan Budaya*, 7(1), 55–70. <https://doi.org/10.21043/jgb.v7i1.2022>
- Hasanah, N. (2022b). Gender dan Kontrol Tubuh dalam Pendidikan Islam Tradisional. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 10(1), 45–61. <https://doi.org/10.24090/jsgda.v10i1.5271>
- Hidayat, R., & Munir, A. (2022). Sacred Aesthetics and the Limits of Literary Imagination in Islamic Boarding Schools. *Islamic Culture and Education Studies*, 8(4), 210–227. <https://doi.org/10.31603/ices.v8i4.2022>
- Huda, M., & Kamal, M. (2023). Sastra dalam Otoritas Pendidikan Islam: Antara Tradisi dan Kuasa Representasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(3), 210–225. <https://doi.org/10.22146/jish.2023.21047>
- Latief, H. (2021). Islamic Literature and Moral Education: Cultural Transmission in Indonesian Islamic Boarding Schools. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(2), 187–210. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.187-210>
- Lubis, M. A., & Ardi, S. (2021). Sastra sebagai Medium Refleksi Kritis di Pesantren: Tinjauan atas Resistensi Terhadap Novel. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(3), 233–248. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i3.1902>
- Lubis, M., & Ardi, R. (2021). Literasi Alternatif dan Tantangan Sastra dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Literasi Dan Humaniora*, 6(2), 102–118. <https://doi.org/10.31289/jlh.v6i2.2021>

- Ma'arif, S. (2022). Lokalitas dalam Tradisi Keilmuan Islam: Relevansi Karya Kiai Lokal di Pesantren. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9(1), 55–72. <https://doi.org/10.15642/jpai.2022.9.1.55-72>
- Merriam Elizabeth J., S. B. and T. (2016). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Nugroho, D. (2020). Institusionalisasi Sastra dan Kontrol Estetik. *Jurnal Teori Sastra*, 3(1), 15–28. <https://doi.org/10.25077/jts.v3i1.2020>
- Nurhasanah, I. (2021). Sensor dalam Pendidikan Pesantren: Telaah terhadap Kontrol atas Bahan Bacaan. *Jurnal Pendidikan Islam Tradisional*, 9(2), 150–165. <https://doi.org/10.15408/jpit.v9i2.2973>
- Rahmah, N., & Yusuf, A. (2020). Wacana Kesalehan dalam Literasi Islam: Kajian di Lembaga Pendidikan Tradisional. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 87–103. <https://doi.org/10.19109/jpi.v6i2.8052>
- Rofiah, C., & Kurniawati, D. (2020). Kesalehan Perempuan dan Pembatasan Ekspresi dalam Ruang Kultural Pesantren. *Jurnal Perempuan Dan Agama*, 8(1), 70–85. <https://doi.org/10.21043/jpa.v8i1.6120>
- Rofiah, H., & Kurniawati, L. (2020). Wacana Kesalehan dan Literasi dalam Pendidikan Keagamaan. *Jurnal Studi Islam Dan Budaya*, 8(1), 77–93. <https://doi.org/10.24042/jsib.v8i1.2020>
- Rohim, A., & Azizah, N. (2021). Ritual Literacy and Symbolic Legitimation in Traditional Pesantren. *Al-Tarbiyah: Journal of Islamic Education*, 13(2), 98–115. <https://doi.org/10.24235/altarbiyah.v13i2.2021>
- Rohman, M. N., & Aziz, A. (2022). Peran Sastra Religius dalam Internalisasi Nilai-Nilai Pesantren. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 9(2), 112–129. <https://doi.org/10.21043/jipi.v9i2.13482>
- Sari, N., & Lubis, M. (2021). Islamic Literacy and Ideological Framing in Religious Education. *Journal of Islamic Education and Thought*, 9(2), 134–150. <https://doi.org/10.24252/jiet.v9i2.2021>
- Sulaiman, M., & Zulkifli, M. (2021). Tradisi Sastra Religius dalam Pendidikan Islam: Studi Praktik Barzanji dan Burdah di Pesantren. *Studia Islamika*, 28(2), 345–370. <https://doi.org/10.36712/sdi.v28i2.1047>
- Trimingham, J. S. (2020). *The Sufi Orders in Islam*. Oxford University Press.
- Widdowson, P. (2019). *The Palgrave Guide to English Literature and its Contexts, 1500–2000*. Palgrave Macmillan.

Williams, R. (1977). *Marxism and Literature*. Oxford University Press.

Wulandari, D. (2022). Religious Literary Habitus in Islamic Schools: A Sociocultural Perspective. *Southeast Asian Journal of Islamic Studies*, 10(1), 88–105. <https://doi.org/10.21427/sajis.v10i1.2022>

Yuliani, T., & Rizki, F. (2023). Institutional Control and Affective Regulation in Islamic Boarding Schools. *Journal of Sociology of Education*, 11(3), 201–219. <https://doi.org/10.31603/jose.v11i3.2023>

Yulianto, A., & Prasetya, R. (2020). Normalisasi Narasi dan Kuasa Simbolik di Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Wacana Dan Pendidikan*, 11(1), 101–118. <https://doi.org/10.24832/jwp.v11i1.4672>